

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Profesionalisme

1. Pengertian profesionalisme dan Unsur-Unsurnya

Istilah profesionalisme lebih banyak diterapkan dalam segala bidang, termasuk dalam lembaga pendidikan formal. Untuk lebih membawa pada pengertian yang sebenarnya, maka istilah profesionalisme dapat disejajarkan dengan seseorang yang telah memiliki profesi. Adapun pengertian profesi dapat dikemukakan menurut beberapa pendapat, antara lain :

- a. Webster's New World Dictionary menjelaskan bahwa profesi adalah suatu pekerjaan yang meminta pendidikan tinggi dalam liberal arts atau science, dan biasanya meliputi pekerjaan mental, bukan pekerjaan manual, seperti mengajar, keinsinyuran, mengarang dan seterusnya; terutama kedokteran, hukum atau teologi (dua disebut profesi-profesi berilmu).²⁵
- b. Good's Dictionary of Education mendefinisikan sebagai : "suatu pekerjaan yang meminta persiapan spesialisasi yang relatif lama diperguruan tinggi dan dikuasai oleh

²⁵. Uteng Sutiana, *Op-Cit*, Hal. 302

suatu kode etik yang khusus.²⁶

- c. Prof. Drs. Piet A. Sahertian menjelaskan bahwa profesionalisasi adalah suatu usaha untuk mencapai tingkat profesional.²⁷

Dan berikut ini adalah unsur-unsur profesi, sebagaimana dikemukakan oleh Muchtar Luthfi bahwa seseorang disebut telah memiliki profesi bila ia memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Profesi harus mengandung keahlian
- b. Profesi dipilih karena panggilan hidup dengan dijalani sepenuh waktu.
- c. Profesi memiliki teori-teori yang baku secara universal.
- d. Profesi adalah untuk masyarakat, bukan untuk diri sendiri.
- e. Profesi harus dilengkapi dengan kecakapan diagnostik dan kompetensi aplikatif.
- f. Pemegang profesi memiliki otonomi dalam melakukan tugas profesinya.

26. Ibid, hal. 303

27. Prof. Drs. Piet A. Sahertian, *Profil Pendidik Profesional*, Pen. Andi Offset, Cet. I, 1994, hal. 36

g. Profesi harus memiliki klien yang jelas, yaitu orang yang membutuhkan pelayanan.²⁸

Masing-masing kriteria tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa :

Pertama, profesi harus memiliki keahlian khusus, dimana tidak semua orang tidak dapat mengenal keahlian yang dipegang oleh orang tertentu. Namun ada pula keahlian yang dapat dikenali oleh orang banyak seperti keahlian bidang ekonomi, dimana keahlian ini dapat dikenali oleh ahli-ahli hukum dan ahli-ahli politik.

Keahlian di sini dimaksudkan bahwa ia hanya dapat dipelajari secara khusus, seperti keahlian kedokteran, diperoleh dengan cara mempelajari secara khusus di Fakultas Kedokteran.

Kedua, profesi harus diambil sebagai pemenuhan panggilan hidup. Dalam arti bahwa profesi tersebut dipilih karena dirasa sebagai panggilan hidup. Sehingga ia menjadi lapangan pekerjaanannya dan ia dapat dengan sepenuh waktu, atau dilakukan dengan sepecah waktu (part time). Lebih-lebih pekerjaan tersebut dianggap sebagai pekerjaan sambilan.

²⁸ Dr. Ahmad Iqbal, Op-Cit. hal. 107.

Ketiga, profesi memiliki teori-teori yang baku secara universal, dimana seorang dikatakan profesional apabila ia telah memegang profesi dengan berdasar pada teori-teori yang baku atau dikenal secara umum, yaitu dikenal oleh pemegang profesi dimanapun ia berada. Untuk mengetahui adanya teori-teori yang baru bagi pemegang profesi maka diperlukan organisasi profesi.

Keempat, profesi adalah untuk masyarakat, bukan untuk kepentingan diri sendiri, seperti mengumpulkan uang dan mengejar kedudukan. Ini tidak berarti bahwa seorang pemegang profesi tidak boleh menerima uang atau menduduki jabatan. Hal ini tetap diperbolehkan, karena dianggap sebagai penghargaan masyarakat atau negara terhadap profesinya. Penghargaan yang diberikan layak diterima dan masyarakat wajar memberinya, karena untuk kepentingan profesi juga membutuhkan biaya, baik ketika ia mempelajari, mengamalkan dan ketika mengembangkannya untuk kepentingan masyarakat.

Kelima, profesi harus dilengkapi dengan kecakapan diagnostik dan keahlian aplikatif. Kecakapan pertama ialah bahwa teori telah berkembang dalam profesi tersebut. Sedang kecakapan kedua, yaitu kewenangan menggunakan teori-teori yang ada dalam keahliannya. Hubungan keduanya tentu saling terkait, karena jika

seseorang tidak mampu mendiagnosa, tentu tidak memiliki wewenang melakukan terhadap kliennya. Kemampuan aplikatif dapat didasarkan pada surat keterangan berupa surat pengangkatan, ijazah atau sertifikat yang menunjukkan kewenangan memegang profesi.

Keenam, profesi harus memiliki otonomi dalam melaksanakan profesinya, mengenai teori-teori otonomi, semua orang tidak berhak untuk membicarakannya. Namun tidak berarti orang lain tidak berhak. Kebolehan disini adalah berbicara tentang kenyataan, yang mungkin benar dan juga salah. Otonomi berarti bebas dalam melaksanakan profesinya sesuai dengan teori-teori yang sudah baku, dan bebas di sini adalah tidak mengandung arti mutlak.

Ketujuh, profesi memiliki kode etik, yaitu memiliki aturan kesopanan.

Kedelapan, profesi harus memiliki klien (pemakai jasa profesi) yang jelas. Kejelasan klien akan memperjelas pemegang profesi. Seperti klien seorang guru adalah seorang murid.

Kesembilan, profesi memerlukan organisasi profesi. Organisasi di sini diperlukan untuk meningkatkan mutu profesi itu sendiri.

Kesepuluh, profesi harus mengenali hubungan profesinya dengan bidang-bidang lain. Profesi seorang

guru atau non guru adalah juga bersangkutan dengan masalah kemasyarakatan, ekonomi, agama bahkan budaya dan politik.

Kecenderungan spesialisasi adalah dibatasi pada pendalaman untuk meningkatkan teori-teori dalam profesinya. Spesialisasi berarti wajib mengetahui teori-teori dalam profesinya.

2. Profesionalisme dalam pandangan Islam

Istilah profesionalisme, menurut Islam sangat diperhatikan. Hal ini dilandasi oleh pernyataan bahwa sesuatu disebut profesi harus memenuhi beberapa kriteria. Sedangkan istilah profesi itu sendiri merupakan sebuah pekerjaan, yang dalam ajaran Agama Islam harus dilaksanakan atau dijalani dengan penuh tanggung jawab, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk orang lain.

Dalam beberapa unsur/kriteria profesi sebenarnya ada dua kriteria pokok, yaitu sebuah panggilan hidup dan keahlian. Kriteria yang lainnya kelihatannya diperlukan untuk memperkuat kedua kriteria ini. Kriteria "panggilan hidup" sebenarnya mengacu kepada pengabdian/dedikasi. Sedangkan "keahlian" mengacu pada mutu pelayanan. Kriteria lainnya adalah untuk mendukung keahlian. Apabila dalam suatu profesi ciri utamanya adalah dedikasi dan

keahlian, maka dengan jelas Islam mementingkan tingkat profesi.

Setiap pekerjaan, dalam ajaran Islam mengandung tuntutan untuk dilaksanakan secara profesional, dalam arti harus secara benar-benar. Dan ini hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang ahli. Tuntutan demikian sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah S.A.W bahwa :

إِذَا وَسَدَّ الْأَمْرُ فِي غَيْرِ أَهْلِهِ، فَانْتَظِرُوا السَّاعَةَ ۖ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ۖ

"Apabila suatu urusan dikerjakan oleh orang yang tidak ahli maka tunggulah, orang" (HR. Bukhari).

Depdiknas memberikan gambaran bahwa dengan suatu keahlian, maka kehancuran akan dapat dihindarkan. Pengertian keahlian atau kemampuan disini sebagaimana dikutip oleh Ahmad Tafsir dalam buku Kurikulum Sekolah Dasar Muhammadiyah Bidang Studi Pendidikan Agama Islam dan ke-Muhammadiyah-ah bahwa syarat-syarat kemampuan dirinci sebagai berikut :

- a. Menguasai bahan.
- b. Menguasai program belajar.
- c. Mengelola kelas.
- d. Menggugurkan media/sumber.
- e. Menguasai landasan-landasan kependidikan.

- f. Mengelola interaksi belajar mengajar.
- g. Menilai prestasi siswa untuk kependidikan dan pengajaran
- h. Menguasai fungsi dan program pelayanan dan bimbingan di sekolah.
- i. Mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah.
- j. Memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian pendidikan guna keperluan pengajaran.³⁰

Islam mengajarkan profesionalisme dalam segala bidang pekerjaan. Sebagaimana tuntutan organisasi Muhammadiyah terhadap para gurunya, yaitu harus memiliki akhlak terpuji yang dapat dijadikan teladan oleh murid-muridnya, baik ketika mengajar maupun tidak. Penilaian positif oleh para siswa terhadap akhlak guru maupun non guru merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan belajar siswa.

B.. Pengelolaan Sekolah

Pengelolaan sekolah merupakan suatu bagian untuk mendayagunakan tenaga manusia, sarana dan prasarana, pembiayaan serta media pendidikan lainnya dalam rangka terlaksananya proses belajar mengajar yang relevan, efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan

³⁰. Ibid, halaman 114-115.

seperti tercantum dalam tujuan insntitusional atau lembaga pendidikan tertentu. Oleh karena itu pengelolaan sekolah dilihat sebagai suatu gugusan problema-problema tertentu yang meliputi :

1. Pengelolaan Bidang Kurikulum

Pengelolaan bidang kurikulum merupakan salah satu sarana penunjang alam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih tinggi. Bidang kurikulum merupakan bidang operasional administrasi yang paling dasar, karena pengembangan program pendidikan akan membawa pada petugas pendidikan yang memiliki wawasan dan ketrampilan.

2. Pengelolaan Bidang Ketenagaan

Kemajuan sekolah tidak hany bergantung pada konsep-konsep program pendidikan yang ada, tetapi juga pada personil pengajar yang memiliki kesanggupan dan keinginan untuk berprestasi, tanpa tenaga yang cukup dan efektif. Kurikulum yang disusun dengan baikpun tidak akan membawa keberhasilan lembaga. Dengan demikian semua tenaga pendidikan harus memiliki dasar pengertian dan ketrampilan yang cukup.

3. Pengelolaan Bidang Kesiswaan

Kurikulum pada prinsipny merupakan bagian dari program sekolah yang menaruh perhatian kepada

pengajaran reguler di kelas. Kegiatan-kegiatan dibidang kesiswaan secara operasional mencakup pelayanan kepada siswa yang melengkapi pengajaran di kelas. Agar pelayanan kepada siswa dapat maksimal, maka program ke-kesiswaan haruslah dilengkapi secara maksimal. Pengelolaan kesiswaan dalam hal ini meliputi :

- a. Kehadiran murid disekolah
 - b. Penerimaan, prestasi, klasifikasi dan penunjukan murid kepada kelas dan program studi
 - c. Evaluasi dan pelaporan kemajuan murid
 - d. Supervisi program-program bagi murid yang mempunyai kelainan, seperti pengajaran perbaikan dan pengajaran luar biasa
 - e. Pengendalian disiplin murid
 - f. Program bimbingan dan penyuluhan
 - g. Program kesehatan dan keamanan
 - h. Penyesuaian pribadi, sosial dan emosional dari murid
4. Pengelolaan Bidang Pembiayaan

Pembiayaan sekolah memiliki peran sosial dalam memelihara, memperlancar dan meningkatkan pengembangan program, mutu dan relevansi pengajaran dan kesempatan pendidikan. Pembiayaan sekolah akan semakin penting apabila lembaga pendidikan memiliki orientasi program

pendidikan yang lebih maju, sehingga para administrator keuangan akan selalu disiplin dalam bertanggung jawab penuh terhadap anggaran keluar masuk bagi tenaga sekolah.

5. Pengelolaan Bidang Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana sekolah termasuk perlengkapan yang diperlukan baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang dianggap sebagai sarana penunjang pelaksanaan tugas pendidikan disekolah.

6. Pengelolaan Bidang Hubungan dengan Masyarakat.

Pengelolaan bidang hubungan dengan masyarakat merupakan upaya pemahaman terhadap pengembangan dan pemeliharaan kooperatif yang efisien dari saluran informasi dua arah serta pemahaman antara sekolah, personilnya dan masyarakat. Dengan demikian yang hendak dicapai dengan adanya program hubungan dengan masyarakat adalah untuk :

- a. Mengembangkan pemahaman tentang maksud dan sarana sekolah
- b. Menilai program sekolah

C. Administrasi Sekolah

1. Pengertian dan Prinsip-prinsip Administrasi.

Administrasi sebagai sentral dalam pembinaan dan

pengembangan kegiatan kerjasama sekelompok manusia, telah banyak diketahui atau dipelajari oleh manusia. Hal ini dilatarbelakangi bahwa sebenarnya manusia selalu memiliki kecenderungan untuk berkelompok, karena manusia diciptakan sebagai makhluk zoon politicon (makhluk sosial). Mereka menyadari bahwa usaha untuk berkelompok adalah memiliki tujuan bersama yaitu memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada masyarakat, dan ini diperlukan suatu usaha pembinaan, pengembangan dan pengendalian secara sistematis dan terarah.

Kerjasama kelompok berkaitan langsung dengan penataan, pengelolaan atau pengaturan dalam rangka mencapai tujuan. Pengertian yang demikianlah yang dapat memberikan gambaran kepada maksud adanya administrasi.

Adapun pengertian administrasi dapat dikemukakan menurut beberapa pendapat sebagai berikut :

- a. Menurut Ordway Tead, : "Adminsitration is conceived as the necessary activites of these individuals (executives) in an organitation who charged with ordering, forwarding, and facilitating the associate efforts of group of individuals brought together to realize certain defined purpose".

Bahasa Indonesianya kurang lebih sebagai berikut :
Administrasi adalah segala aktivitas individu-individu (para pejabat) dalam suatu organisasi yang berkaitan dengan tugas memerintah, memajukan dan memperlengkapi usaha bersama dari kelompok individu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

b. Dr. Suharsimi Arikunto, menurut pengertian modern bahwa administrasi adalah suatu usaha bersama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien dengan menggunakan segala dana dan daya yang ada. ³¹

c. Dr. Hadari Nawawi, bahwa administrasi adalah kegiatan/rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya. ³²

d. Drs. M. Ngalim Purwanto, MP., berpendapat bahwa kata administrasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai tujuan.

31. Dr. Suharsimi Arikunto, *Organisasi dan Administrasi*, Rajawali Pers, Cet. 1, Jakarta, 1990, hal 31.

32. Dr. Hadari Nawawi, *Op.Cit.*, 1992, hal 7.

Dari beberapa pendapat di atas dapat diambil pengertian bahwa administrasi mengandung konsekwensi sebagai suatu aktivitas yang digerakkan secara bersamaan atau menyatukan dari banyak orang untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan secara maksimal yaitu dengan memanfaatkan segala sarana dan prasarana yang tersedia.

Berkenaan dengan prinsip-prinsip administrasi, maka tidak akan terlepas dari pengaturan dan pengendalian yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan, dimana suatu administrasi menghendaki adanya usaha kerjasama, tidak individual, sehingga dalam administrasi didapati tiga hal sebagai prinsip administrasi, antara lain :

- a. Adanya kegiatan bersama yang dilakukan sekelompok manusia.
- b. Adanya penataan atau pengaturan dalam kerjasama.
- c. Adanya tujuan yang akan dicapai dari kegiatan kerjasama.³³

Tiga prinsip di atas merupakan tuntutan bagi perubahan kearah perbaikan baik bagi individu maupun

33. Drs. Hendyat Soetopo, Drs. Wasty Soemanto, **Organisasi dan Administrasi Pendidikan, Usaha Nasional, 1994, hal. 14.**

masyarakat dengan dimulainya perubahan pada semua tingkat tingkat pendidikan, untuk menuju kesana kepemimpinan pendidikan yang profesional sangat diperlukan, sehingga seorang administrator, akan memegang kunci dalam perubahan pendidikan dan pula bahwa administrator harus seorang yang memiliki inovasi dari praktek-praktek adminsitratif baru. Untuk mencapai keefektifan dalam peranan ini, maka administrator diharuskan mengelola sekolah dan personil agar pengajaran dapat berjalan efektif dan efisien.

Seorang administrator (pengelola) dituntut untuk tetap mencari apa yang akan membuat program pendidikan menjadi lebih baik bagi semua kepentingan. Untuk itu diperlukan seorang administrator yang profesional dalam mengendalikan usaha kerjasama yang ada disekolah. Permasalahan administratif yang fundamental dan kompleks adalah suatu hal yang mendorong para administrator pendidikan untuk berkembang kearah profesi yang sebenarnya (sungguh-sungguh). Dengan kata lain adalah untuk meningkatkan profesionalisme dalam administrasi pendidikan, khususnya profesionalisme dalam mengelola sekolah.

2. Pengertian, tujuan dan fungsi administrasi pendidikan atau sekolah.

2.1. Pengertian administrasi pendidikan

Beradasar pada pengertian administrasi secara umum tersebut diatas, dapat dijadikan sebagai terapan bagi pengertian administrasi pendidikan dalam arti luas. Konsep administrasi pendidikan lebih mendudukan peran manusia dalam usaha mengendalikan aspek personil untuk selalu bekerja sama . Hal ini disebabkan karena manusia yang akan membuat, memegang kebijaksanaan, melaksanakan, menata, mengkoordinasikan dan mengevaluasi segala aktivitas pendidikan.

Adapun pengertian administrasi pendidikan, dapat dikemukakan oleh beberapa pakar sebagai berikut :

- a. Dr. S. Nasution, memberikan definisi bahwa administrasi pendidikan adalah suatu proses keseluruhan, semua kegiatan bersama dalam bidang pendidikan dengan memanfaatkan semua fasilitas yang tersedia baik personal, material maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan.³⁴
- b. Drs. M. Ngalim Purwanto, MP. mendefinisikan administrasi sebagai segenap proses pengarahan dan

³⁴. Ibid, hal 23.

pengintegrasian segala sesuatu, baik personal, spiritual maupun material, yang bersangkutan paut dengan pencapaian tujuan pendidikan.³⁵

Berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud, maka yang dikehendaki dari adanya administrasi atau pengarahan di sekolah adalah adanya saling kerjasama, partisipasi dan saling mengerti dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Sebagaimana ditafsirkan oleh Hasan Mustafa dalam buku Asas-asas Pendidikan Islam oleh Hasan Langgulung bahwa : Administrasi sekolah sebagai; " sejumlah proses yang dikerjakan oleh lebih dari seorang individu dengan jalan partisipasi, kerjasama dan saling mengerti, dimana setiap individu dalam batas kemampuannya. Bekerja untuk memberi pelayanan yang menolong memperbaiki proses pendidikan dan pengajaran dan mencapai tujuan-tujuan sosial umum. Sebagaimana setiap orang bekerja dalam kawasannya dalam semangat kerjasama dan musyawarah dan berdasar pada hubungan-hubungan kemanusiaan yang betul.³⁶

35. Drs. H. Ngelim Purwanto, *Op.Cit.*, hal 3.

36. Prof. Dr. Hasan Langgulung, *Asas-Asas Pendidikan Islam* Pen. Pustaka Al-Husna, Cet. II, Jakarta, 1988, hal. 199.

Pengertian di atas memberikan arahan bahwa administrasi pendidikan merupakan sebuah proses dalam mencapai tujuan pendidikan. Proses dalam arti bahwa segala yang dikerjakan adalah untuk memberikan pelayanan kepada klien (dalam hal ini siswa) dan dengan disertai usaha bersama secara terorganisir yaitu dengan memanfaatkan, menghubungkan serta menggerakkan berbagai sumber-sumber baik personal maupun non personal (materiil) yang tersedia untuk dikembangkan dan dikendalikan agar dalam pencapaian tujuan pendidikan dapat terlaksana. Untuk memanfaatkan, menghubungkan dan menggerakkan berbagai sumber diperlukan personil-personil yang mampu membidangnya, termasuk disini adalah semua pengorganisasi yang terdiri dari para pengusaha, para guru dan tenaga kependidikan lainnya.

Tujuan administrasi pendidikan

Pada bab awal telah dijelaskan bahwa tujuan pendidikan di Indonesia adalah menjadikan warganya agar selalu memiliki kepribadian yang mantap, sehingga sesuai cita-cita bangsa. Dengan dasar demikian, maka kebijaksanaan berada di tangan Pemerintah, karena sesuai dengan UUD 1945 pasal 31 ayat 2 bahwa :
"Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu

sistem pengajaran Nasional, yang diatur dengan undang-undang".

Administrasi yang diselenggarakan oleh sekolah, pada dasarnya adalah bagian dari administrasi yang dilaksanakan oleh negara, yaitu dengan tidak terlepas dari pengendalian dan arahan dari pemerintah, karena pemerintah memiliki tujuan yang sama dengan lembaga formal pendidikan yaitu terciptanya manusia yang memiliki kualitas tinggi. Meskipun pengelolaan atau administrasi sekolah merupakan usaha kerjasama yang terlepas dari campur tangan pemerintah, namun tidak berarti bahwa lembaga pendidikan formal (sekolah) dalam kegiatan operasionalnya lepas dari kendali dan arahan dari pemerintah.

Selama ini memang urusan lembaga pendidikan formal (sekolah) merupakan urusan lembaga sendiri, yaitu selama kegiatan atau jalannya lembaga pendidikan tersebut tidak bersimpangan dengan tujuan nasional. Oleh karenanya hal ini dikemukakan oleh Hadari Nawawi bahwa : "Administrasi pendidikan tidak bisa dilepaskan dari administrasi negara, karena tujuan yang dikandung dari keduanya adalah untuk mencari sistem dan mengembangkan agar menjadi sarana efektif untuk

untuk mencapai tujuan pendidikan. ³⁷

Pendapat di atas juga dilandasi bahwa pengelolaan sekolah, selalu bersifar private administration dimana pengelolaannya merupakan urusan rumah tangga sendiri, baik berkenaan dengan keuangan, personalia, pengadaan sarana prasarana maupun lainnya. Tetapi usaha untuk merealisasikan kepentingan pribadi itu tidak boleh bertentangan dengan tujuan dan cita-cita nasional, meskipun kegiatan administrasi pendidikan adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan kegiatan operasional kependidikan dalam mencapai tujuan pendidikan. ³⁸

Tujuan lain dikemukakan bahwa administrasi pendidikan memiliki tujuan agar segala usaha kerjasama dalam mendayagunakan berbagai sumber (manusia dan non manusia) dapat berjalan secara teratur, efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan. ³⁹

Dengan beberapa tujuan administrasi pendidikan di atas, maka perlu diperhatikan bahwa tanpa pelaksanaan administrasi yang baik, maka pengendalian ke arah tujuan

³⁷ - Dr. Hadari Hawawi, *OpCit.*, hal. 13.

³⁸. *Ibid.* hal. 12.

³⁹. Drs. Hendyat Soetopo, Drs. Wasty Soemanto, *Op-Cit.*, hal. 26.

pendidikan tidak akan tercapai dengan lebih sempurna. Hal ini didasari bahwa sebenarnya administrasi pendidikan merupakan salah satu dari keseluruhan alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Administrasi pendidikan yang baik akan menentukan baik tidaknya pendidikan yang dilaksanakan, dan untuk menentukan atau mencapai administrasi pendidikan yang baik, maka sangat diperlukan para personil sekolah (pengelola atau pelaksana) yang memiliki kompetensi atau kualitas yang dapat diandalkan. Sehingga dari sini nampak kelihatan bahwa personil yang profesional untuk pelaksanaan suatu administrasi sekolah adalah suatu kebutuhan yang sangat mendesak, sehingga hal ini akan dapat membawa para personil sekolah untuk lebih mudah atau dapat memanfaatkan dan memberikan pelayanan kepada siswa secara maksimal. Dampak yang ditimbulkan dari pelayanan yang maksimal adalah menjadikan para siswa senang dalam belajar, sehingga prestasi mereka dapat terus meningkat.

Dengan demikian pengelolaan administrasi dalam lembaga pendidikan formal, secara eksplisit akan lebih memudahkan pekerjaan administratif dan pendidikan, memudahkan proses-prosesnya dalam pencapaian tujuan pendidikan dan dapat menambah produktivitas kerja diantara personil sekolah dalam lembaga pendidikan.

3. Fungsi-fungsi administrasi pendidikan

Penentuan apakah administrasi akan dapat mengantarkan pada pencapaian tujuan, maka harus digunakan beberapa media atau bidang untuk menggambarkan kepentingan, fungsi dan proses-proses pelaksanaan serta teknis yang kita harapkan dari adanya administrasi pendidikan, dengan syarat komponen media atau bidang tersebut harus terdapat hubungan yang erat.

Sebagai gambaran yang jelas tentang fungsi-fungsi tersebut, maka akan diuraikan sebagai berikut :

a. *Perencanaan (Planning)*

Perencanaan sebagai awal dari suatu kegiatan seperti dalam bidang administrasi adalah sangat menentukan gagal tidaknya tujuan yang akan dicapai. Dengan perencanaan, sebelum kegiatan dimulai, maka beberapa kesulitan dan rintangan-rintangan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan akan dapat diminimalisir bahkan memungkinkan untuk bisa dihindari. Oleh karena itu perlu diperhatikan dua faktor yang terpenting, yaitu tujuan dan sarana baik personil maupun non personil. Dua faktor penting ini harus diperhatikan oleh seorang personil sebelum melaksanakan tugasnya, sehingga dapat mengetahui arah

kemana lembaga pendidikan itu akan berjalan. Tentu yang demikian harus dimiliki oleh seorang pengelola sekolah, karena dengan perencanaan akan dapat menuntun kearah pemenuhan tujuan pendidikan dengan syarat sebagai berikut :

"Terangnya tujuan, realisme dalam rangka potensi yang ada dan diharapkan, kesinambungan, koordinasi, ketuhan, wujudnya data-data statistik yang tepat dan menyeluruh, fleksibilitas dan kesediaan berubah bila perlu dan kepatuhan yang menghendaki bahwa bila rencana sudah disetujui maka ia sudah menjadi beban dan ikatan".⁴⁰

Berkaitan dengan ini, seorang profesional harus memiliki kesadaran bahwa suatu organisasi hanya bisa dijalankan dengan adanya perubahan pada diri personil untuk siap berubah mengikuti peraturan yang direncanakan sebelumnya oleh lembaga pendidikan formal tertentu.

b. Pengorganisasian

Beranekaragamnya pekerjaan bidang pendidikan membutuhkan pembagian tugas-tugas, wewenang dan tanggung jawab. Ini sangat perlu dilakukan agar tercipta usaha kerjasama dalam mencapai tujuan

⁴⁰. Prof. Dr. Hasan Langgulung, *Opcit* hal. 208.

pendidikan yang telah ditetapkan. Banyaknya pekerjaan tidak mungkin dilaksanakan oleh satu individu saja, sehingga berakibat kurang maksimalnya pelayanan terhadap siswa. Misalnya hanya oleh Kepala Sekolah.

Pernyataan ini didukung oleh pendapat bahwa :

" Aktivitas menyusun dan membentuk hubungan-hubungan sehingga terwujudlah kesatuan usaha dalam mencapai maksud-maksud dan tujuan pendidikan ".⁴¹

Pernyataan tersebut memberikan indikasi bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan pendidikan adalah hanya dapat diusahakan dengan membentuk hubungan-hubungan kerjasama.

c. Pengkoordinasian

Koordinasi merupakan alat untuk mengarahkan setiap personil agar dapat berjalan satu arah untuk mencapai tujuan. Koordinasi dimaksudkan untuk mengatasi adanya overlapping (tumpang tindih) nya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Yang dimaksud pengkoordinasian disini adalah suatu usaha memadu, menyatukan, mensesuaikan, mengintegrasikan semua kegiatan yang ada dalam suatu organisasi agar pencapaian tujuan bersama dapat berjalan dengan serasi dan seimbang. Dengan begitu kegiatan yang satu akan

⁴¹ Drs. H. Ngaliw Purwanto, *Op-Cit.*, hal. 17.

dapat mengait dan memperlancar kegiatan yang lain.⁴²

Untuk Yang demikian ini hanya dapat dilaksanakan oleh seorang pemimpin, dalam hal ini seorang kepala sekolah. Karena maksud sebenarnya dari koordinasi adalah sebagai aktivitas yang membawa orang-orang, material, pikiran-pikiran, tehnik-tehnik dan tujuan ke dalam hubungan yang harmonis dan produktif dalam mencapai suatu tujuan. Jika hal seperti ini dapat dilaksanakan, maka nampaklah bahwa semua personil sekolah harus mengikuti syarat-syarat/unsur-unsur profesionalisme.

d. Komunikasi

Dalam administrasi pendidikan, komunikasi yang dapat menunjang lancarnya kegiatan adalah sangat dibutuhkan yaitu dengan tidak memperhatikan apakah komunikasi itu dipengaruhi oleh faktor subyektif atau tidak. Sebagai contoh karena pengaruh subyektif, yaitu apabila ada kebutuhan saja atau karena desakan masyarakat agar para administrator pendidikan melalui komunikasi kebutuhan komunikasi yang ini bahkan merupakan bagian dari syarat

⁴² See also: Endo Brakunto, *Organisasi dan Administrasi Pendidikan-teknologi dan kejuruan*, Rajawali Pers, Cet. 1, 1991, Jakarta, hal 44.

seorang profesional, dimana salah satu syarat profesional yaitu adanya tuntutan kemampuan dalam budaya profesi. Contoh yang demikian akan membawa pengaruh pada ketidakberhasilan dari adanya komunikasi secara maksimal. Jika tidak ada desakan dari masyarakat, maka para pengelola lembaga pendidikan (sekolah) tidak akan melakukan komunikasi. Pernyataan demikian tentu akan merusak citra lembaga, seolah-olah lembaga melakukan komunikasi hanya karena ada tuntutan. Seharusnya komunikasi yang dilakukan haruslah dilandasi pernyataan bahwa sebenarnya yang diharapkan dalam komunikasi adalah adanya motivasi dari diri sendiri agar dapat menerima instruksi atau pengaruh dari kawan sekerja atau pimpinan.

Motivasi dari dalam (diri sendiri/intrinsik) dalam kegiatan komunikasi memiliki beberapa unsur sebagai berikut:

- Adanya keinginan untuk berhasil.
- Kejelasan tentang tindakan yang harus diambil atau dianjurkan.
- Keyakinan bahwa perubahan yang dianjurkan akan membawa hasil yang positif.
- Keyakinan adanya kesempatan yang sama bagi semua anggota.

- Keinginan akan adanya kebebasan untuk menentukan, menolak ataupun menerima apa yang dianjurkan.
- Adanya tendensi untuk menilai (berdasarkan moral dan etika yang dianutnya) apa yang dianjurkan sebelum melaksanakan.⁴³

e. Supervisi

Supervisi atau pengawasan yang dikehendaki dalam administrasi pendidikan adalah adanya kepastian bahwa seorang pelaksana pendidikan dalam melaksanakan pekerjaan pada lembaganya dapat berjalan menurut tujuan-tujuan yang telah ditentukan, sehingga apabila ada hal yang bertentangan dengan ketetapan semula, maka seorang pelaksana pendidikan tersebut dapat memperbaiki kesalahan pada waktu yang sesuai.

Pengawasan atau supervisi dapat berfungsi untuk menemukan titik-titik kelemahan dan kesalahan supaya mudah diperbaiki dan dijauhkan berlakunya untuk masa yang akan datang. Pengawasan yang dimaksud baik berkenaan dengan peralatan, manusia-manusia dan kerja-kerja lembaga yang besar seperti SLTP 1 Negeri Sidoarjo akan menuntut pengawasan yang lebih besar pula, sehingga prosesnya menjadi tidak sedemikian

⁴³. Drs. H. Ngelim Purwanto, Op-Cit., hal. 19.

rumit apabila didukung dengan pengelolaan yang sebenarnya. Dampak positif dari pengawasan yang lebih besar adalah keberhasilan proses administratif. Hal demikian akan tercapai karena dengan melihat bahwa supervisi/penilaian sebagai fungsi administrasi pendidikan berarti suatu aktivitas untuk menentukan kondisi-kondisi atau syarat-syarat yang esensial yang akan menjamin tercapainya tujuan pendidikan.

f. Kepegawaian

Berkenaan dengan fungsi kepegawaian, maka tidak akan terlepas dari personil. Kepegawaian sudah tercakup dalam perencanaan dan pengorganisasian, yaitu bagaimana personil-personil yang menduduki jabatan tertentu itu dipilih dan diangkat sesuai dengan jabatan yang dipegangnya. Dalam administrasi pendidikan menitikberatkan pula bahwa hanya pada orang yang profesional dibidangnyaalah yang akan menempati posisi yang sesuai.

Tanggung jawab seseorang dalam mengelola sekolah selayaknya berlatar belakang kualifikasi atau memenuhi syarat-syarat sebagai seorang profesional, dimana mereka dituntut untuk lebih tanggung jawab dalam mengelola sekolah, khususnya yang banyak berhubungan dengan pelayanan kepada siswa, maupun kepada

masyarakat umumnya. Tuntutan semacam ini diperkuat oleh beberapa alasan/faktor bahwa yang menyebabkan kebutuhan akan perubahan khususnya bagi guru/pengelola sekolah secara umum, adalah sebagai berikut:

- 1). Kritik yang tajam terhadap kelambanan pendidikan yang menyesuaikan diri kepada kebutuhan-kebutuhan baru di masyarakat.
- 2). Pengakuan yang jujur oleh para profesional bahwa peningkatan dalam kualitas pendidikan sangat diperlukan, dan
- 3). Kekurangan dalam jumlah guru dengan kualifikasi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan yang ada.⁴⁴

Jika hal pemilihan dan kesempatan per sudah
diberikan maka dan sikan selanjutnya adalah
"berikan motivasi" agar para pegawai selalu giat
bekerja. kesejahteraan pegawai (jasmani maupun
rohani), insentif dan penghargaan atas jasa-jasa
mereka, bimbingan untuk dapat lebih maju, adanya
kesempatan untuk meng-upgrade (menatar) diri, masalah
pemberhentian dan pensiun pegawai.

⁴⁴. Froh. M., Oleg Sultana, M.Sc. Ed., Op-Cit., hal. 115-116.

f. *Pembiayaan*

Kebutuhan vital dalam suatu organisasi adalah menyangkut dana atau pembiayaan, karena hal ini akan menjamin berjalan lancar atau tidaknya organisasi, khususnya organisasi pendidikan, seperti di SLTP 1 Negeri Sidoarjo. Pembiayaan dalam organisasi pendidikan meliputi dana bagi personil maupun materialnya.

Mengingat bahwa fungsi pembiayaan adalah perencanaan tentang berapa biaya yang diperlukan, dimana dan bagaimana biaya itu dapat diperoleh atau diusahakan, bagaimana penggunaannya, siapa yang akan melaksanakan, bagaimana pembukuan dan pertanggungjawabannya, bagaimana pengawasannya, dll.⁴⁵

Dengan demikian pernyataan tersebut memberikan tuntutan secara maksimal kepada para pelaksana/pengelola lembaga pendidikan untuk lebih meningkatkan keprofesionalisan terutama dalam masalah keuangan, yaitu dapat mengalokasikan dana untuk kebutuhan siswa dan prasarana, baik untuk personil sekolah dan siswanya.

45. Drs. H. Ngelim, *Op-Cit.*, hal. 20.

g. Penilaian

Dalam keseluruhan organisasi selalu terdapat aktivitas menilai, yaitu untuk menentukan sampai dimana pelaksanaannya dalam mencapai tujuan, apakah berjalan sesuai dengan rencana (program) yang telah ditetapkan sebelumnya.

Penilaian mencakup seluruh kerja administratif dan pendidikan serta semua aspek kegiatan, program media, benda dan alat-alat pada lembaga tertentu yang memberi pengaruh pada suasana administratif dan pendidikan di sekolah tertentu. Penilaian yang baik akan memperhatikan syarat-syarat dan unsurnya. Misal Menyeluruh (agar penilaian itu bersifat obyektif), kontinyu, kooperatif, memperhitungkan berbagai faktor yang akan mempengaruhi kemampuan lembaga dan orang-orangnya, dan haruslah wujud pandangan yang menyeluruh dan utuh. ⁴⁶

2.3. Ruang lingkup administrasi pendidikan

Mengingat luasnya pembahasan mengenai administrasi pendidikan yang meliputi seluruh proses aktivitas pendidikan baik formal maupun non formal, maka untuk lebih jelasnya tentang ruang lingkup

⁴⁶. Prof. Dr. Hasan Langgulung, *Op-Cit.*, hal. 213.

administrasi pendidikan antara lain :

a. Manajemen Administratif (Administrative Management). Bidang kegiatan ini disebut juga *management of administrative function* yakni kegiatan-kegiatan yang bertujuan agar semua orang dalam organisasi/kelompok kerjasama mengerjakan hal-hal yang tepat sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

b. Manajemen operatif (Operative Management).

Bidang kegiatan ini disebut juga *management of operative function*, yakni kegiatan-kegiatan yang bertujuan mengarahkan dan membina agar dalam mengerjakan pekerjaan yang menjadi beban tugas masing-masing, setiap orang melaksanakannya dengan tepat dan benar.⁴⁷

Dengan demikian ruang lingkup administrasi pendidikan mencakup seluruh kegiatan yang m,engarahkan kepada seluruh personil agar bena tugas yang diembannya selalu dijalankan dengan baik dan berjalan sesuai dengan tujuan lembaga.

⁴⁷ Dr. Hadari Nawawi, Op-Cit., 1995, hal. 13.

2.4. Administrasi pendidikan profesional di sekolah dan unsur-unsur-nya.

Salah satu sistem yang memungkinkan proses kependidikan berlangsung secara konsisten dan berkesinambungan dalam rangka mencapai tujuan adalah adanya kelembagaan yang didukung administrasi yang tertib dan teratur dengan diikuti para personal (aparatur kependidikan) yang profesional dibidangnya.

Keprofesionalisan administrasi sekolah sangat diperlukan terutama pada saat dimana orang akan selalu menuntut kearah perbaikan terhadap lembaga dimana anak mereka dididik, dan pula dimungkinkan sebagai perbaikan bagi masyarakat. Kemampuan dalam mengelola administrasi sekolah adalah memegang kunci utama dalam proses pencapaian tujuan. Keberadaan masyarakat yang selalu berubah dan berkembang, selalu menuntut (para guru) yang handal dan inovatif dalam memegang tanggung jawab sebagai pengelola sekolah, mereka (masyarakat sekitar, terutama orang tua siswa) juga menuntut pula terhadap para pelaksana pendidikan, dalam hal ini seorang administrator/pengelola sekolah agar bisa berperan secara aktif dan efektif dalam mengelola sekolah.

Oleh karena itu dalam menghadapi tuntutan masyarakat yang sedemikian besar dan berat, para pelaksana pendidikan harus dapat semaksimal mungkin untuk mengorganisasi sekolah dan personilnya dengan berbekal kemampuan profesional yang dimiliki agar pengajaran dapat berjalan efisien, karena tuntutan masyarakat terhadap lembaga agar dikelola secara profesional tidak lain adalah agar proses belajar mengajar tidak mengalami hambatan sehingga dapat menunjang keberhasilan belajar siswa. Oleh karena itu lembaga formal (sekolah) seperti sekarang ini lebih membutuhkan seorang profesional yang lebih berorientasi pada nilai-nilai, sikap dan perbuatannya yang profesional dengan memperhatikan pada teori-teori serta berpedoman pada etika profesi.

Dengan keberhasilan belajar yang telah dicapai siswa dan pelaksanaan administrasi yang baik, maka masyarakat akan mengakui bahwa personilnya betul-betul administrator profesional yang diakui secara umum, sebagaimana seorang dokter, hakim dan jabatan-jabatan lain yang telah menempati status profesi.

Demikian pula terhadap kebutuhan akan profesionalisme administrasi pendidikan di sekolah yang tidak mungkin dapat dielakkan, mengingat

pertumbuhan penduduk yang akan terus berjalan dengan cepat. Kebutuhan lembaga formal akan mengalami kenaikan, beserta itu pula akan terjadi tuntutan perubahan yang fundamental terhadap semua bidang serta kemampuan yang maksimal dalam mengelolanya, baik dalam hal administrasi maupun personilnya.

Gambaran pekerjaan administrasi atau mengelola sekolah memang kompleks disamping mementingkan pekerjaan yang berhasil. Sebuah pendidikan formal akan mengikat beberapa aspek, sebagai contoh aspek sosial, dimana pendidikan akan dapat merubah pola kehidupan masyarakat. Jika demikian adanya, maka sangat diperlukan kemampuan yang betul-betul berkualitas dalam administrasi.

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang profesionalisme, maka berikut ini dikemukakan karakter/ciri-ciri yang menunjukkan.

Menurut **Komisi Kebijakan Pendidikan NEA Amerika Serikat**, menyebut enam kriteria bagi profesi di bidang pendidikan, antara lain :

- a. Profesi didasarkan atas sejumlah pengetahuan yang dikhususkan
- b. Profesi mengejar kemajuan dalam kemampuan para anggotanya

- c. Profesi melayani kebutuhan para anggotanya (akan kesejahteraan dan pertumbuhan profesional)
- d. Profesi memiliki norma-norma etis
- e. Profesi mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah di bidangnya (mengenai perubahan-perubahan dalam kurikulum, struktu organisasi pendidikan, persiapan profesional, dst.).
- f. Profesi memiliki solidaritas kelompok profesi.⁴⁸

Sedangkan pada sumber lain dijelaskan bahwa karakteristik dari suatu orientasi profesional, diantaranya adalah:

- a. Keputusan profesional didasarkan pada keahlian teknis yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan secara intensif.
- b. Memberi pelayanan pada klien
- c. Disamping memiliki norma pelayanan, terdapat pula norma-norma yang menentukan hubungan antara profesional dan klien. Orientasi profesional adalah obyektif, impersonal dan imparsial.
- d. Berorientasi pada kelompok, yaitu kolega yang berpengetahuan dan kompeten dalam bidang yang bermanfaat untuk membuat keputusan.

⁴⁸. Prof. Dr. Uteng Sutisna, M.Sc. Ed., Op-Cit., hal. 304.

e. Performance dikendalikan terutama oleh dirinya sendiri serta dari pengamatan kelompok.⁴⁹

Uraian di atas menunjukkan bahwa profesional yang dimaksudkan di sini adalah mengacu pada dasar keahlian, baik ahli dalam pengetahuan, ketrampilan dan ahli dalam melayani klien (siswa/masyarakat) dan pula memiliki norma dalam kehidupan berorganisasi. Sehingga dalam pembahasan ini tuntutan profesionali diarahkan pada nilai-nilai sikap dan perbuatan para profesional dalam lapangan di lembaga tertentu.

Perkaitan dengan pembahasan ini, jika kita ingin betul betul membangun administrasi pendidikan kearah status profesional, maka konsep yang ada dalam unsur-unsur profesional dapat dipakai untuk mengembangkan konsep yang lebih jelas tentang tujuan dan arah pembinaan profesionalisme pendidikan pada umumnya dan adminisrtasi sekolah pada khususnya.

Unsur-unsur tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Dr. Oteng Sutisna, M. Sc. Ed., yaitu :

- 1). Teori sistematis, yaitu teori yang berhubungan dengan bagaimana pelaksanaan administrasi sekolah sebagai alat/pedoman untuk melaksanakan suatu

49. Drs. Sutaryadi, M.Pd., *Administrasi Pendidikan, Usaha Nasional*, Cet. 1, Surabaya, 1993, hal. 39.

pekerjaan. Bagi seorang profesional, teori akan dapat membawa manfaat, antara lain :

- a. Pendidikan akademis yang lama dipandang perlu, karena pemahaman teori yang penting bagi ketrampilan profesional. Karena untuk persiapan bagi suatu profesi harus meliputi pengalaman intelektual maupun praktek di lapangan.
- b. Fungsi pengambilan calon yang lebih sanggup. Mereka yang memiliki kemampuan teori/intelektual akan diterima dan ditempatkan pada tempat yang sesuai dengan pengetahuan yang didapatkan.

2). Kewenangan profesional, dimana profesionalisme menuntut adanya otonomi dan tanggung jawab penuh dalam pekerjaan. Namun bukan berarti tanpa batas. Mereka akan dibatasi oleh pendidikan dan latihan seperti yang diperoleh, sehingga jika mereka menekuni bidang di luar yang ia tekuni, maka termasuk dalam suatu pelanggaran kewenangan kelompok profesional, meskipun mereka telah memiliki otonomi, namun tidak berfungsi secara mandiri, karena dimungkinkan para profesional juga akan mencari bantuan dari kolega yang lebih berpengalaman.

- 3). Sangsi masyarakat, yaitu kelompok profesi seperti sekolah, akan mengusahakan agar masyarakat menguatkan kewenangan dengan memberikan sejumlah kekuasaan dan hak khusus tertentu. Pengakuan masyarakat dapat berbentuk formal (seperti kesepakatan yang diperkuat oleh hukum), pemberian kekuasaan seperti pengawasan profesi melalui pusat-pusat pendidikannya, dimana ini akan dapat dicapai dengan proses akreditasi (pengakuan bahwa program pendidikan yang dijalankan oleh suatu pusat pendidikan telah memenuhi standar-standar yang diminta oleh lembaga akreditasi dan organisasi profesi). Suatu lembaga akan berhak melakukan praktek pengelolaan secara profesional apabila telah mendapat pengakuan.
- 4). Kode etik, dimana kewenangan yang diberikan pada orang tertentu, akan mempengaruhi pelayanan pada klien (masyarakat/siswa), sehingga dimungkinkan dapat dipakai untuk melindungi kepentingan pribadi sedang kepentingan masyarakat/siswa terabaikan. Untuk menghindarinya ditetapkanlah pedoman atau kode etik yang mengatur hubungan seorang profesional dengan klien dan kawan sekerja.

Masing-masing pedoman/kode etik yang dimaksud adalah mengatur hubungan seorang profesional terhadap:

- a. Klien, meliputi : 1). Tidak bersikap dan berperasaan memihak, 2). Memberi jasa kepada siapapun yang meminta tanpa pandang umur, penghasilan keluarga, bangsa dan agama, jenis kelamin dan status sosial klien, 3). Termotivasi untuk berbuat sebaik-baiknya kepada orang lain/menekankan kepada pengabdian secara maksimal kepada masyarakat, profesi dan klien serta menolak menyalahgunakan profesi yang dipegangnya.
 - b. Kawan sekerja, yaitu : 1). Bersikap kooperatif, mempersamakan dan mendukung, 2). Terbiasa melibatkan kolega/orang lain dalam melakukan penilaian dan pelayanan terhadap kebutuhan klien, 3). Terbiasa meneruskan urusan klien kepada kolega yang lebih trampil dalam melayani, sehingga dapat memberi pelayanan yang lebih baik.
- 5). Kebudayaan profesi, dimana seorang harus dapat mengenal dan dapat berakulturasi (menyatu) dengan kebudayaan profesi. Ketidaktahuan atau kurang

kenalnya seseorang terhadap kebudayaan profesi akan mengakibatkan komunikasi berjalan tidak seimbang, dan jelas ini akan membawa dampak negatif bagi tidak lancarnya pencapaian tujuan pendidikan. Hal seperti ini sangat diperincikan oleh seseorang profesional meskipun ia sudah memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus, namun belum menjamin keberhasilan praktek profesionalnya.

- 6). Persatuan profesi, yaitu suatu profesi bukanlah mencakup sekelompok individu tertentu yang memilikiki wewenang, namun merupakan gabungan dari beberapa person yang bertujuan memberikan jasa sosial yang maksimal. Oleh karena itu dibawah ini merupakan ciri-ciri yang menunjukkan personil yang tergabung dalam kelompok profesional adalah :
- a. Adanya ikatan profesi
 - b. Tindakan bersama yang teratur
 - c. Tanggung jawab penuh terhadap masyarakat dari pada kewajiabn anggota secara perorangan.
 - d. Pengakuan usaha bersama.⁵⁰

⁵⁰. Prof. Dr. Gteng Sutisna, Op.Cit., hal. 305-307.

D. Tinjauan tentang Prestasi Belajar

1. *Pengertian prestasi belajar*

Untuk lebih mengarahkan pada pemahaman tentang prestasi belajar, berikut ini diuraikan tentang arti dari masing-masing.

Menurut Drs. Saiful Bakri Djamarah, prestasi dapat diartikan sebagai : hasil dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan.⁵¹

kan, diciptakan, baik secara individual maupun kelompok. Prestasi tidak akan pernah dihasilkan selama seseorang tidak melakukan suatu kegiatan. Dalam kenyataan, untuk mendapatkan prestasi tidak semudah yang dibayangkan, tetapi penuh perjuangan dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi untuk mencapainya.⁵¹ Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa kata prestasi memiliki arti hasil yang telah dicapai (dilakukan, dikerjakan dsb.)⁵²

Sedangkan pengertian belajar, Dr. Nana Sudjana berpendapat bahwa belajar merupakan suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang.

⁵¹. Drs. Saiful Bakri Djamarah, *Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru*, Cet. 1, Usaha Nasional, 1994, Surabaya, hal. 21.

⁵². W. J. S. Poerwadarminta, *Op-Cit.*, hal. 768.

Perubahan sebagai hasil dari proses belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti berubah pengetahuan, pemahaman, sikap dan tingkah laku, ketrampilan, kecakapan, kebiasaan, serta perubahan aspek-aspek lain yang ada pada individu yang belajar.⁵³

Dan definisi lain dinyatakan bahwa : "Belajar terjadi apabila suatu situasi stimulus bersama dengan isi ingatan mempengaruhi siswa sedemikian rupa sehingga perbuatannya (performance-nya) berubah dari waktu sebelum ia mengalami situasi itu ke waktu sesudah ia mengalami situasi tadi.⁵⁴ Oleh karenanya elemen yang penting yang mencirikan pengertian belajar dimana tingkah laku mengalami perubahan, karena belajar menyangkut berbagai aspek kepribadian, baik fisik maupun psikis, seperti : perubahan dalam pengertian, pemecahan suatu masalah/berpikir, ketrampilan, kecakapan, kebiasaan, ataupun sikap.⁵⁵

Dengan demikian yang dimaksud dengan prestasi belajar adalah penilaian pendidikan tentang kemampuan

53. Dr. Nana Sudjana, *Cara Belajar Siswa Aktif*, Sinar Baru Algensindo, Cet. III, Bandung, 1996, hal. 5.

54. Drs. H. Noalim Purwanto, M.P. Ed., *Psikologi Pendidikan*, Remaja Rosdakarya, Cet. XI, 1996, Bandung, hal. 84.

55. *Ibid*, hal. 85.

siswa dalam segala hal yang dipelajari di sekolah yang berhubungan dengan pengetahuan/kecakapan/ketrampilan yang dinyatakan sesudah hasil penilaian. Pada umumnya prestasi belajar diwujudkan dalam bentuk indeks prestasi yang merupakan angka komulatif rata-rata selama bersangkutan mengikuti jenjang sekolah/periode belajar tertentu. Prestasi akan dapat menentukan seseorang terhadap kelanjutan program belajar/terhadap naik tidaknya ke jenjang sekolah selanjutnya.

2. Fungsi prestasi belajar

Prestasi belajar sebagai suatu hasil penilaian pendidikan tentang kemajuan siswa, ini dapat diketahui/dinilai setelah siswa melakukan aktifitas belajar. Fungsi prestasi belajar .f#53

tidak hanya untuk mengetahui sejauhmana kemajuan siswa setelah menyelesaikan suatu aktifitas, namun yang lebih penting adalah sebagai alat untuk motivasi bagi setiap siswa agar lebih giat dalam belajar, baik secara individu maupun kelompok. Pernyataan ini didukung oleh Drs. Saiful Bakri Djamarah bahwa : "Meskipun prestasi belajar dijadikan alat motivasi, namun tidak semua siswa termotivasi untuk meningkatkan prestasi belajarnya. Hal ini kemungkinan besar ada faktor-faktor lain sebagai kendalanya. Dalam hal ini bisa menyangkut faktor bahan

pelajaran dan lingkungan.

Untuk dapat memahami secara mendalam tentang prestasi belajar dan aspek-aspek penilaian, maka harus diketahui bahwa penilaian adalah aktifitas dalam menentukan tinggi rendahnya prestasi belajar itu sendiri, dan tentu pembahasan penilai tidak akan lepas dari pembahasan tentang evaluasi.

Evaluasi menurut Wand dan Brawn yang diikuti oleh Saiful Bakri adalah sebagai suatu tindakan atau proses menentukan nilai segala sesuatu dalam dunia pendidikan. Dari evaluasi ini diharapkan untuk memberikan informasi tentang kemajuan-kemajuan yang telah dicapai siswa, bagaimana dan sampai dimana penguasaan dan kemampuan yang siswa dapatkan setelah mempelajari suatu matapelajaran. Dalam rangka untuk mendapatkan data sebagai bahan guna mempermudah dalam melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan pengajaran, dilaksanakan test formatif ataupun sumatif. Penggunaan test-test ini dimaksudkan untuk mendapatkan data tentang prestasi belajar para siswa, dan untuk mengetahui keefektifan proses belajar mengajar.

Prestasi belajar sebagai alat motivasi sangat berkaitan dengan aktifitas belajar siswa. Siswa tidak

Op-Cit., Saiful Bakri, Op-Cit., hal. 29.

akan mempelajari sesuatu bila hal itu tidak menyentuh kebutuhannya. Kebutuhan dalam hal ini adalah prestasi belajar. Seluruh aktifitas belajar siswa adalah untuk mendapatkan prestasi belajar yang baik, setiap siswa pasti tidak ingin memperoleh prestasi belajar yang jelek. Oleh karena itu, setiap siswa berlomba-lomba untuk mencapainya dengan suatu usaha yang dilakukan seoptimal mungkin. Dalam hal yang demikian maka prestasi belajar bisa dikatakan sebagai kebutuhan yang memunculkan motivasi dari dalam diri siswa untuk selalu belajar. 57

3. *Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar*

Para pelaksana pendidikan dapat meningkatkan/memberikan hal-hal yang positif untuk meningkatkan hasil/prestasi belajar bagi siswanya, apabila sudah dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya. Berikut ini skema tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar.

57. Drs. Saiful Bakri Djamarah, *Op.Cit.*, hal. 27 - 28.

Prestasi Belajar

Faktor Internal Biologis : Usia Kematangan Kesehatan Psikologis : Minat Motivasi Suasana hati	Faktor Eksternal Manusia : di keluarga di sekolah di masyarakat Non manusia: Udara Suara Bau-bauan
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skema/bagan di atas menunjukkan bahwa keberhasilan belajar dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Keberhasilan belajar siswa berawal dari usaha yang dilakukan oleh dirinya sendiri, dengan melalui aktifitas belajar. Sedangkan siswa dalam belajar tentu membutuhkan suasana yang betul-betul mendukung dan memudahkan belajar, salah satunya adalah suasana hati yang tenang untuk belajar. Suasana hati dapat diperoleh melalui pelayanan secara baik-baik dari aparat/pelaksana sekolah (baik guru, kepala sekolah, tata usaha maupun lainnya). Keberadaan pelaksana lembaga pendidikan akan sangat mewarnai hitam putihnya prestasi belajar siswa, nama dan administrasi sekolah. Oleh karenanya tuntutan administrasi dan manajemen sekolah yang dikelola oleh kepala sekolah yang profesional adalah suatu kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan. Dan suatu hal yang tidak boleh diabaikan bahwa faktor administrasi/manajemen sekolah

yang baik adalah dapat mempengaruhi hasil belajar siswa, seperti dikutip oleh M. Ngalim Purwanto dalam buku Psikologi Pendidikan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi belajar adalah :

		Alam
	Lingkungan	Sosial
	Luar	
		Kurikulum/bahan
pelajaran		Guru/pengajar
	Instrumental	Sarana dan fasilitas
		Administrasi/manajemen
Faktor		
		Kondisi fisik
	Fisiologi	
		Kondisi panca indera
	Dalam	
		Bakat
		Minat
	Psikologi	Kecerdasan
		Motivasi
		Kemampuan kognitif. ⁵⁸

Faktor luar, seperti instrumenal, dalam hal ini administrasi/manajemen juga sangat menentukan proses dan hasil belajar, karena ini akan membawa hasil/output yang dikehendaki, dan pula akan menentukan bagaimana proses

⁵⁸. M. Ngalim Purwanto, MP. Ed., *Op.Cit.*, th. 1996 hal. 107.

belajar mengajar itu akan terjadi dalam diri si pelajar. Selain faktor tersebut di atas, juga terdapat faktor lingkungan sekolah seperti para guru, para staf administrasi dan teman-teman sekelas, dimana mereka dapat mempengaruhi semangat belajar seorang siswa. Para guru yang selalu menunjukkan sikap dan perilaku simpatik dan memperlihatkan sikap teladan yang baik dan rajin, khususnya dalam hal belajar, misalnya rajin membaca dan berdiskusi dapat menjadi daya motivasi yang praktis bagi kegiatan belajar siswa.⁵⁹

E Tinjauan tentang Pendidikan Agama Islam

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang pengertian Pendidikan Agama Islam, penulis akan meninjau pengertian pendidikan secara umum dengan menurut beberapa pendapat, antara lain :

- a. Menurut Drs. Amien Daien Indrakusuma, bahwa pendidikan adalah suatu usaha sadar yang teratur dan sistematis, yang dilakukan oleh orang-orang yang diserahi tanggung jawab untuk mempengaruhi anak agar mempunyai sifat dan

⁵⁹. Dr. Huhubnan Syah, M.Ed., Psikologi Pendidikan-Suatu Pendekatan Baru, Remaja Rosdakarya, Cet. II, Bandung, 1995, hal. 137.

tabiat yang sesuai dengan cita-cita pendidikan.⁶⁰

- b. Tim Dosen IKIP Malang, bahwa pendidikan ialah aktifitas dan usaha manusia untuk meningkatkan kepribadiannya dengan jalan membina potensi-potensi pribadinya, yaitu rohani (pikir, karsa, rasa, cipta dan budi nurani) dan jasmani (panca indera serta ketrampilan-ketrampilan).⁶¹
- c. Menurut Drs. Imam Bawani MA., bahwa pendidikan adalah Ta'lim, Tarbiyah dan Ta'dib. Tetapi yang populer di negara Arab. Bahkan di negara Indonesia ialah Tarbiyah, menyusul Ta'lim dan jarang yang menggunakan Ta'dib.⁶²
- d. Menurut Dra. Zuhairini bahwa pendidikan adalah suatu aktifitas untuk mengembangkan seluruh aspek kepribadian manusia yang berjalan seumur hidup. Dengan kata lain pendidikan tidak hanya berlangsung di dalam kelas, tetapi berlangsung di luar kelas. Pendidikan bukan bersifat formal saja, tetapi mencakup pula yang

⁶⁰. Drs. Amien Daien Indrakusumah, Pengantar Ilmu Pendidikan, Usaha Nasional, 1973, Surabaya, hal. 27.

⁶¹. Tim Dosen IKIP Malang, Pengantar Dasar-dasar Kependidikan, Cet. III, Usaha Nasional, 1988, Surabaya, hal. 7.

⁶². Drs. Imam Bawani, Segi-segi Pendidikan Islam, Al-Ikhlâs, Surabaya, 1987, hal. 60.

non formal. 63

Dari berbagai pendapat di atas, maka penulis sependapat dengan pasal 1 ayat 1 UU. No. 2 Tahun 1989, bahwa pengertian pendidikan adalah suatu usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang.

Adapun Pendidikan Agama Islam diartikan sebagai suatu proses ikhtiar manusia yang mengandung ciri dan watak khusus dari kedua aspek tersebut adalah merupakan proses penanaman, pengembangan dan pemantapan nilai-nilai keimanan yang menjadi fundamen mental spiritual manusia darimana sikap dan tingkah lakunya termanifestasikan, menurut kaidah-kaidah agamanya. 64

Sedangkan pengertian pendidikan Islam menurut H. M. Arifin yaitu sistem pendidikan yang dapat memberikan kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupannya sesuai dengan cita-cita Islam, karena nilai-nilai Islam telah menjiwai dan mewarnai gerak kepribadiannya. 65. Prof. Dr. H. M. Athiyah M. Iqbal juga menegaskan bahwa pendidikan

63. H. M. Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, Cet. I, Bumi Aksara, Jakarta, 1992, hal. 149.

64. Prof. Dr. H. M. Arifin M. Ed., *Kapita Selekta Pendidikan (Islam dan Umum)*, hal. 210.

65. Prof. H. M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, Cet. III, Bumi Aksara, 1974, Jakarta, hal. 10.

agama adalah untuk mendidik akhlak dan jiwa mereka, menanamkan rasa fadilah (keutamaan, membiasakan mereka dengan kesopanan yang tinggi, mempersiapkan mereka untuk suatu kehidupan yang suci seluruhnya, ikhlas dan jujur.⁶⁶

2. Fungsi dan tujuan Pendidikan Agama Islam

Dalam Garis-Garis Besar Program Pengajaran matapelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) tahun 1995 disebutkan beberapa fungsi dari matapelajaran Pendidikan Agama Islam, antara lain :

- a. Pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketaqwaan peserta didik kepada Allah SWT. yang telah ditanamkan dalam lingkungan keluarga.
- b. Penyaluran, yaitu untuk menyalurkan peserta didik yang memiliki bakat khusus yang ingin mendalami bidang agama, agar bakat tersebut dapat berkembang secara optimal sehingga dapat bermanfaat untuk dirinya sendiri dan bagi orang lain.
- c. Perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan peserta didik dan mengganggu perkembangan dirinya menuju manusia Indonesia seutuhnya.
- d. Pencegahan, yaitu untuk menangkal hal-hal negatif dari lingkungannya atau dari budaya asing yang dapat membahayakan peserta didik dan mengganggu perkembangan

⁶⁶. Dra. Zuhairini, Op-Cit., hal. 155.

dirinya menuju manusia Indonesia seutuhnya.

- e. Penyesuaian, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan fisik maupun lingkungan sosial dan dapat mengubah lingkungannya sesuai dengan ajaran Islam.
- f. Sumber nilai, yaitu memberikan pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.
- g. Pengajaran, yaitu untuk menyampaikan pengetahuan keagamaan yang fungsional.⁶⁷

Adapun tujuan Pendidikan Agama Islam adalah sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri. Menurut Dr. Zakiah Daradjat, dkk., bahwa tujuan Pendidikan Islam adalah kepribadian muslim, yaitu suatu kepribadian yang seluruh aspeknya dijiwai oleh ajaran Islam. Orang yang berkepribadian muslim dalam Al-Qur'an disebut "muttaqin". Karena itu juga pendidikan Islam juga pembentukan manusia yang bertakwa. Ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional kita yang dituangkan dalam tujuan pendidikan nasional yang akan membentuk manusia pancasilais yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁶⁸

Agama Islam memang bukan merupakan bidang suatu ilmu yang dikelompokkan dalam bidang studi dan tak bisa disamakan dengan satu disiplin ilmu yang bersumber pada

⁶⁷. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Garis-Garis Besar Program Pengajaran PAI, 1975, hal. 1.

⁶⁸. Dr. Zakiah Daradjat, dkk., *Methodologi Pengajaran Agama Islam*, Jil. 1, Bumi Aksara, 1996, Jakarta, hal. 72.

hasil pengolahan otak manusia. Namun untuk memudahkan dalam mempelajarinya, orang membagi dan memperinci pengajaran Agama Islam itu ke suatu bidang studi, sesuai dengan sifat dan ruang lingkup (bahan) yang akan dipelajari. Jika sudah ditetapkan bahwa agama Islam itu sebagai suatu bidang studi, maka berikut ini tujuan diterapkannya agama Islam sebagai bidang studi adalah untuk memberikan kemampuan dasar kepada siswa tentang Agama Islam untuk mengembangkan kehidupan beragama sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, serta berakhlak mulia sebagai pribadi, anggota masyarakat dan warga negara serta untuk mengikuti pendidikan menengah.

3. Ruang lingkup Pendidikan Agama Islam

Ruang lingkup Pendidikan Agama Islam secara garis besar untuk mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara :

- a. Hubungan manusia dengan Allah
- b. Hubungan manusia dengan sesama manusia
- c. Hubungan manusia dengan diri sendiri
- d. Hubungan manusia dengan makhluk lain dan alam lingkungannya.

Adapun ruang lingkup Pendidikan Agama Islam meliputi tujuh unsur pokok, yaitu : 1). Keimanan, 2). Ibadah, 3). Al-Qur'an, 4). Akhlak, 5). Muamalah, 6). Syariat, dan 7). Tarikh.

Pada tingkat sekolah dasar penekanan diberikan kepada keimanan, ibadah, Al-Qur'an dan akhlak. Pada tingkat SLTP dan SLTP rambunya adalah dengan pokok-pokok agama, akhlak, keimanan, syariat dan tarikh semakin dikembangkan.

4. Rambu-rambu

Dalam GBPP untuk tingkat SLTP dijelaskan bahwa pelaksanaan Pendidikan Agama Islam salah satu rambu-rambunya adalah dengan pendekatan fungsional, yaitu usaha untuk menyajikan ajaran agama Islam dengan menekankan kepada segi kemanfaatannya bagi peserta didik dalam kehidupannya sehari-hari dengan tingkat perkembangannya.

E. Hubungan Profesionalisme Pengelolaan Sekolah dengan Prestasi Belajar Siswa Bidang Studi Pendidikan Agama Islam

Personil sekolah yang mengacu kearah profesional dalam mengelola lembaga tertentu merupakan salah satu tuntutan yang tidak bisa tidak harus dipenuhi dan dikembangkan sebagaimana disebutkan pada bab terdahulu bahwa masyarakat akan selalu mencari atau memilih lembaga yang dikelola secara profesional oleh para personilnya. Hal ini tidak lain adalah karena masyarakat (terutama orang tua siswa) akan menaruh harapan sepenuhnya kepada lembaga yang dikelola secara profesional tersebut bagi kemajuan dan perkembangan belajar anak mereka.

Profesionalisme sebagaimana telah disebutkan syarat-syarat atau unsur-unsurnya akan banyak memberikan nilai positif bagi perkembangan jiwa anak mereka (para siswa). Mereka (para siswa) akan banyak menyerap nilai-nilai positif dari para personil, karena para siswa dapat menilai bahwa dengan pelayanan kepada siswa yang baik, maka hal ini merupakan salah satu alat untuk merubah sikap para siswa untuk berbuat baik (berakhlakul karimah).

Sedangkan ruang lingkup Pendidikan Agama Islam salah satunya adalah akhlak, sehingga dari penilaian penulis bahwa materi Pendidikan Agama Islam di sekolah tingkat pertama adalah meliputi tujuh unsur pokok sebagaimana dikemukakan di awal. Karena para siswa telah mendapat pengalaman atau pelayanan yang baik dari para guru, Tata Usaha dan tenaga non kependidikan lainnya, maka mereka secara otomatis telah menghayati dan mempraktekkan materi akhlak dalam kehidupan sehari-hari.